

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
MENURUT LAPANGAN USAHA
2011 - 2015**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
MENURUT LAPANGAN USAHA
2011 - 2015**



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA MENURUT LAPANGAN USAHA 2011 - 2015

ISSN : 2406-842X
Nomor Publikasi : 14550.1604
Katalog BPS Provinsi Riau : 9302008.14
Ukuran Buku : 21 cm X 28 cm
Jumlah Halaman : vii+79 halaman

Naskah
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://riau.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau menurut Lapangan Usaha merupakan publikasi tahunan yang menampilkan kondisi ekonomi tahun terakhir, yakni periode 2011-2015. Publikasi ini merupakan hasil rekapitulasi dari pendapatan regional masing-masing kabupaten/kota.

Perkembangan ekonomi di setiap kabupaten/kota penting untuk dicermati secara spasial agar memudahkan para pengambil kebijakan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan. Pola perkembangan ekonomi tersebut dapat berbeda antar kabupaten/kota, karena sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia serta teknologi yang tersedia. Ketersediaan faktor-faktor produksi akan menghasilkan output/produksi yang beragam dan pada gilirannya akan membentuk struktur ekonomi daerah.

Struktur dan pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran atas kemajuan pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Selain indikator tersebut, PDRB per kapita juga disajikan dalam publikasi ini.

Saran dan masukan dari pengguna data sangat diharapkan demi meningkatnya kualitas publikasi ini di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Oktober 2016

K e p a l a ,

ADEN GULTOM

	Halaman
BAB III. PERKEMBANGAN PDRB ANTAR DAERAH	53
A. PDRB Tanpa Migas	53
3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	53
3.2 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	55
3.3 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota	56
3.4 Struktur Ekonomi Tiga Sektor Utama	58
B. PDRB Dengan Migas	60
3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	60
3.6 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	63
3.7 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota	65
LAMPIRAN TABEL-TABEL POKOK	68-79

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR TABEL ANALISIS

Tabel		Halaman
1.1.	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB.....	6
1.2.	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010.....	7
3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2011-2015 (%)	54
3.2	Distribusi PDRB tanpa Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2011-2015 (%)	56
3.3	PDRB Perkapita tanpa Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2011-2015 (Juta Rp)	57
3.4	Struktur Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier, 2011-2015 (%)	59
3.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2011-2015 (%)	62
3.6	Distribusi Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2011-2015 (%)	64
3.7	PDRB Perkapita dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2011-2015 (Juta Rp)	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
1.	Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau 2015 (%)	61
3.	Struktur Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau 2015 (%)	65

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel		Halaman
1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	68
2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	68
3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hulu atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	69
4	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hulu atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	69
5	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	70
6	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	70
7	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	71
8	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	71
9	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) ...	72
10	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	72
11	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	73
12	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	73
13	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah).....	74
14	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	74
15	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	75
16	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	75

Tabel	Halaman
17 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	76
18 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	76
19 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	77
20 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	77
21 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) ...	78
22 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	78
23 Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) ...	79
24 Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	79

<http://riau.bps.go.id>

Pendahuluan

Pendahuluan

-
- 1.1 Latar Belakang**
 - 1.2 Pengertian PDRB**
 - 1.3 Kegunaan PDRB**
 - 1.4 Perubahan Tahun Dasar PDRB**
-

<http://riau.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/ regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan

ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

1.2 Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.3 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu

wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

1.4 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan

tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA2008?

SNA2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;

- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

BPS telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;

- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index* /PPI);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress* (WIP) pada *Cultivated Biological Resources* (CBR):**
Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

¹ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- **Metodologi** : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM).

- **Valuasi** : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).

Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- **Klasifikasi** :

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

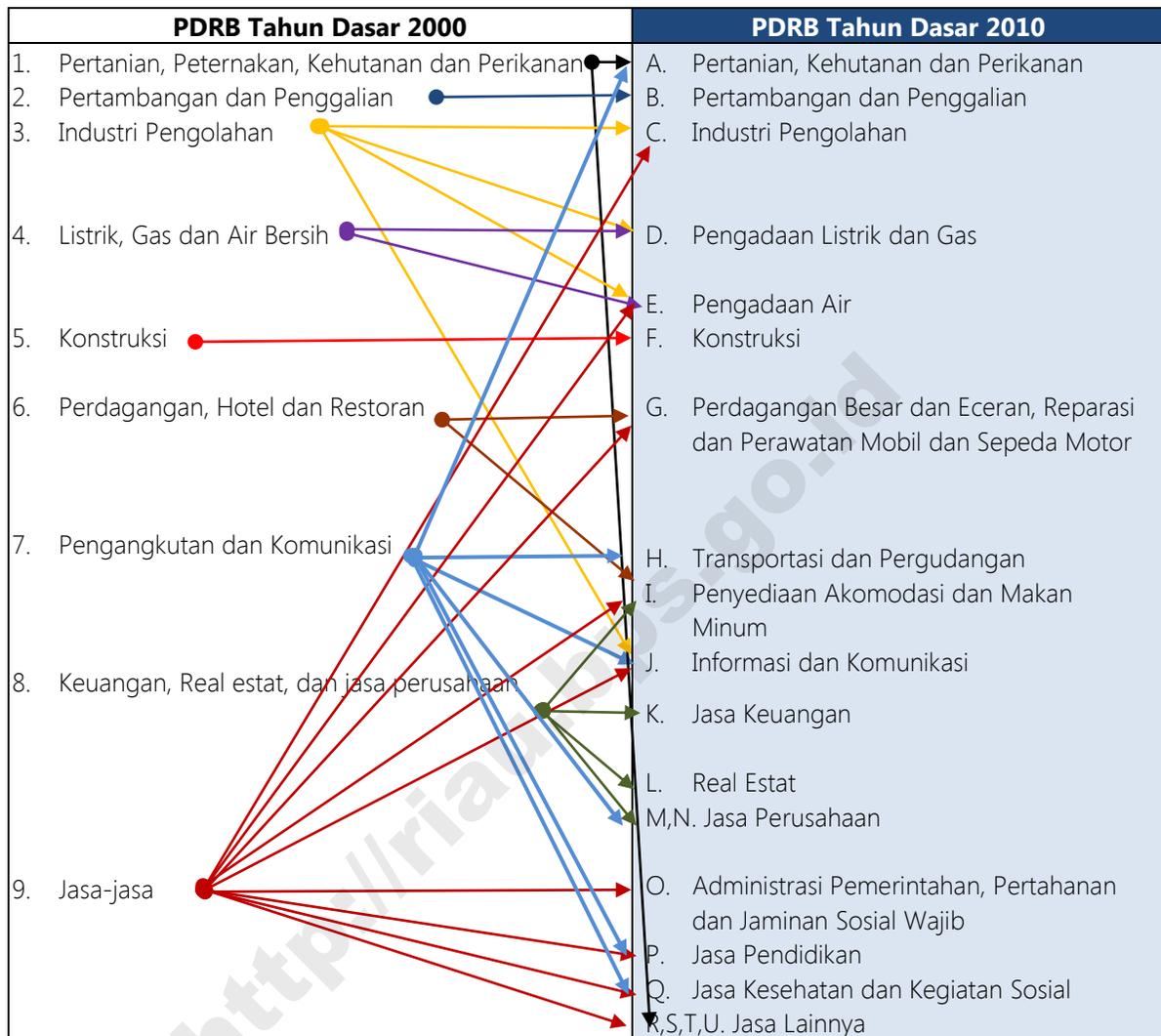
Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC)	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

**Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000
ke PDRB Tahun Dasar 2010**

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

<http://riau.bps.go.id>

Tabel 1.2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010



Uraian Sektoral

Uraian Sektoral

-
- 2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**
 - 2.2 Pertambangan dan Penggalian**
 - 2.3 Industri Pengolahan**
 - 2.4 Pengadaan Listrik dan Gas**
 - 2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang**
 - 2.6 Konstruksi**
 - 2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**
 - 2.8 Transportasi dan Pergudangan**
 - 2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**
 - 2.10 Informasi dan Komunikasi**
 - 2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi**
 - 2.12 Real Estat**
 - 2.13 Jasa Perusahaan**
 - 2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**
 - 2.15 Jasa Pendidikan**
 - 2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**
 - 2.17 Jasa Lainnya**
-

BAB II

URAIAN SEKTORAL

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Usaha ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang

menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan dari kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas tersebut masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur

pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Subdit Statistik Hortikultura, BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis,

cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari

Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya

duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data harga produsen

diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicapuk juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan

produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output

konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, Bursa

Efek Indonesia (BEI) dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas - BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi /Kabupaten/Kotamadya; Dinas

Pendapatan Daerah.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi

barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan. Sementara itu PDB triwulan di estimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi (DNP).

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk

penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri Minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009 : kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 12

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penununan dan penyelesaian tekstil dan

bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti : spreng, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 15

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti

kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, Subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009 : kode 16

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Percetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009 : kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan

baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya. yang menghasilkan dan menggunakan

tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan meubeler dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan meubeler adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan meubeler cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri-BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi-BPS, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran - BPS, sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga-BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas-BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi

yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri - BPS. Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga - BPS. Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK - BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga

konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan

Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum

barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan. Baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT. PLN setiap triwulan dan juga statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN(Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau

kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan sampah/limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data Produksi adalah BPS - Subdit. Statistik Pertambangan dan Energi, APBD (Kemenkeu); data Output Sampah diperoleh dari Subdit. Statistik IBS- BPS; Data Harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen - BPS; Data Struktur Biaya diperoleh dari hasil Survei Tahunan Air Bersih - BPS.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di

bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan;

pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang-BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor-BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor-BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar-BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi-BPS.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan

besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah

perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui

antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter*/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkut). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB

dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Jakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia

(PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-

rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines

dan PT Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhandha Ghara Reksa, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya.

Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010

- BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi - BPS.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi

perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta

laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat Pembinaan Kesenian dan perfilman, Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan

penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak bertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak bertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan

diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, BPS.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pension. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan *leasing* lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga

konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian

sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat

Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode

deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna

karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan

Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), BPS; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam

ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus

Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); berbagai survei khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya,

kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga

kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, and Subdirektorat Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi

antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdirektorat Pertambangan, Energi dan Konstruksi (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk *The Internasional Moneter Fund*, *The World Bank*, *The World Health Organization (WHO)*, *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)* dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan

badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

Perkembangan PDRB Antar Daerah

-
- 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota tanpa Migas**
 - 3.2 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota tanpa Migas**
 - 3.3 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota tanpa Migas**
 - 3.4 Struktur Ekonomi Tiga Sektor Utama**
 - 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dengan Migas**
 - 3.6 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota dengan Migas**
 - 3.7 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota dengan Migas**
-

BAB III

PERKEMBANGAN PDRB ANTAR DAERAH

Pada bab ini memaparkan gambaran umum tentang kondisi perekonomian kabupaten/kota se-Provinsi Riau baik tanpa migas maupun dengan migas selama periode 2013-2015. Melalui ulasan ringkas ini dapat menggambarkan perekonomian kabupaten/kota se-Provinsi Riau dalam menggali potensi sumber daya ekonomi masing-masing daerah. Indikator-indikator makro seperti laju pertumbuhan, kontribusi masing-masing sektor dalam perekonomian, dan PDRB per kapita diharapkan dapat membantu memudahkan dalam perencanaan pembangunan.

A. PDRB tanpa Migas

3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Krisis ekonomi global yang terjadi sejak akhir tahun 2008 dan diikuti dengan penurunan harga kelapa sawit hingga berkisar tiga ratusan rupiah berdampak bagi perekonomian Riau. Seluruh provinsi se Sumatera mencatat pertumbuhan lebih rendah dari tahun sebelumnya, demikian juga tingkat pertumbuhan tingkat nasional. Namun mulai tahun 2010 perekonomian mulai membaik, hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya memasuki tahun 2012 krisis keuangan yang melanda negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat mulai mengganggu kinerja ekonomi global. Negara-negara *emerging market* yang secara

fundamental ekonomi cukup baik, mulai tertekan akibat krisis tersebut. Tidak terkecuali Indonesia juga terkena imbas dampak krisis yang tercermin dari kinerja perekonomian yang mulai melambat. Pada tahun 2012, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,03 persen dan tahun 2013 melambat menjadi sebesar 5,58 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Demikian pula halnya dengan Provinsi Riau, pada tahun 2012 perekonomian Riau dengan migas tumbuh sebesar 3,76 persen melambat menjadi sebesar 2,48 persen pada tahun 2013. Perekonomian Riau sangat dipengaruhi oleh perekonomian global, terutama sektor migas dan kelapa sawit. Bergejolaknya harga minyak mentah dan harga CPO di pasar internasional akan berimbas pada kinerja ekonomi Riau.

Pada tahun 2015, anjloknya harga minyak mentah dunia sekitar 33 USD/barel dan diperparah dengan kondisi kabut asap yang melanda Riau dan sebagian besar Pulau Sumatera, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Riau kembali tertekan, hanya tumbuh sebesar 0,22 persen.

Pertumbuhan ekonomi Riau selama tahun 2015 merupakan hasil kinerja secara simultan dari kondisi perekonomian setiap kabupaten/kota se Provinsi Riau. Secara umum, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2015 juga mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan ada yang mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi yang demikian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan merupakan representasi dari perekonomian Provinsi Riau. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya yakni mencapai 5,47 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut lebih ditopang oleh struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi, perdagangan, dan industri pengolahan

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas
Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2013-2015
(%)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015*
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	5,47	5,14	-2,12
2. Indragiri Hulu	6,40	5,67	-2,95
3. Indragiri Hilir	7,17	6,86	2,06
4. Pelalawan	5,53	6,28	2,52
5. Siak	4,92	4,31	2,57
6. Kampar	6,86	4,84	1,52
7. Rokan Hulu	6,48	6,12	2,03
8. Bengkalis	5,45	6,38	3,26
9. Rokan Hilir	5,64	6,88	2,10
10. Kep. Meranti	8,17	7,26	4,53
11. Pekanbaru	5,59	6,89	5,47
12. Dumai	4,43	2,48	3,08
RIAU	5,47	5,92	2,01

Keterangan: *) Angka sementara

Kota dan kabupaten lainnya yang juga memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi pada tahun 2015 yaitu Kepulauan Meranti sebesar 4,53

persen dan Bengkalis sebesar 3,26 persen. Namun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu pada periode yang sama justru mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu masing-masing sebesar -2,12 persen dan -2,95 persen. Pertumbuhan negatif yang dialami kedua kabupaten tersebut terutama disebabkan oleh penurunan produksi batubara yang sangat signifikan sebagai dampak dari diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang efektif diberlakukan pada Januari 2014. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 3.1.

3.2 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui peran kabupaten/kota dalam perekonomian provinsi dapat dilihat melalui besaran nilai PDRB kabupaten/kota atas dasar harga berlaku terhadap total PDRB pada suatu provinsi.

Pada Tabel 3.2 dapat diperoleh informasi bahwa selama kurun waktu tahun 2013-2015, peran Kota Pekanbaru masih menempati urutan teratas dalam pembentukan ekonomi Riau tanpa migas. Peran yang cukup dominan berikutnya selama tahun 2015 adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Siak dan Bengkalis dengan masing-masing kontribusinya sebesar 10,79 persen, 10,78 persen dan 10,56 persen. Peran keempat kabupaten/kota tersebut sangat signifikan dalam membentuk perekonomian Provinsi Riau tanpa migas, terutama Kota Pekanbaru sebagai pusat konsentrasi aktivitas ekonomi

Tabel 3.2
Distribusi PDRB Tanpa Migas Kabupaten/Kota se-
Provinsi Riau, 2013-2015
(%)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015*
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	5,71	5,49	5,25
2. Indragiri Hulu	7,57	7,37	6,96
3. Indragiri Hilir	11,02	10,93	10,79
4. Pelalawan	7,98	7,90	7,96
5. Siak	11,45	11,08	10,78
6. Kampar	10,00	9,62	9,61
7. Rokan Hulu	5,50	5,47	5,41
8. Bengkalis	9,74	10,19	10,56
9. Rokan Hilir	9,01	9,10	9,31
10. Kep. Meranti	2,33	2,44	2,47
11. Pekanbaru	16,09	16,97	17,51
12. Dumai	3,60	3,45	3,38
Total PDRB Kab/Kota	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka masih sementara

Secara umum pembangunan ekonomi setiap kabupaten/kota berkembang dengan arah yang baik karena terjelaskan berdasarkan kontribusi yang berkembang relatif stabil hingga tahun 2015. Ini berarti keselarasan dalam kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari setiap kabupaten/kota tersebut terhadap total penciptaan barang dan jasa di Riau berkembang dengan baik. Kontribusi ekonomi khususnya di kabupaten/kota pemekaran, seperti Kabupaten Kuansing, Pelalawan, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Dumai terus berkembang stabil terhadap perekonomian Provinsi Riau. Demikian juga hal yang sama dialami oleh kabupaten/kota induk.

Khusus untuk Kota Pekanbaru masih yang paling pesat, sehingga dapat dikatakan bahwa selain menjadi pusat pemerintahan provinsi, Kota Pekanbaru juga menjadi pusat perekonomian di Riau. Namun, dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota lain maka diharapkan pembangunan di daerah tersebut mampu menjadi lokomotif baru perekonomian di Riau di kemudian hari.

3.3 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota

Salah satu tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang disertai upaya pengentasan kemiskinan antara lain dengan melakukan perbaikan kondisi kesehatan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas dan menciptakan kemandirian SDM sehingga berpeluang besar dapat berperan dalam memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah yang dinikmati per penduduk secara nominal, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 berguna untuk mengetahui nilai tambah yang dinikmati per penduduk secara riil, seperti yang tercantum pada Tabel 3.3.

PDRB per kapita Riau selama kurun waktu 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2013 sebesar Rp 61,67 juta naik menjadi Rp 70,52 juta pada tahun 2014 dan naik lagi menjadi Rp 75,92 juta pada tahun 2015, demikian pula keadaan PDRB per kapita

kabupaten/kota selama kurun waktu yang sama juga mengalami peningkatan.

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita tanpa Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2013-2015 (Juta Rp)

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2013	2014	2015*	2013	2014	2015*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kuantan Singingi	70,02	77,33	80,16	63,04	65,45	63,32
2. Indragiri Hulu	72,60	80,38	81,59	62,60	64,74	61,52
3. Indragiri Hilir	60,45	68,85	73,60	50,72	53,49	53,89
4. Pelalawan	83,76	91,54	96,20	74,98	75,67	73,72
5. Siak	103,47	113,06	117,31	87,07	88,23	87,96
6. Kampar	49,91	54,39	58,18	45,30	46,27	45,80
7. Rokan Hulu	37,93	42,05	43,86	34,39	35,01	34,29
8. Bengkalis	69,35	83,15	93,16	63,93	66,97	68,16
9. Rokan Hilir	55,58	63,43	69,29	48,25	50,13	49,80
10. Kep. Meranti	48,97	59,20	65,44	47,16	50,29	52,21
11. Pekanbaru	61,43	73,39	80,95	51,85	53,95	55,44
12. Dumai	49,34	53,89	56,76	44,13	44,26	44,69
R i a u	61,67	70,52	75,92	54,99	56,79	56,50

Keterangan: *) Angka masih sementara

Di tahun 2015, PDRB perkapita atas harga berlaku tertinggi adalah Kabupaten Siak dengan Rp 117,31 juta perkapita pertahun, dan bila dilihat secara riil (konstan 2010) PDRB perkapita tertinggi selama tahun 2015 juga dicapai oleh Kabupaten Siak dengan nilai Rp 87,96 juta perkapita pertahun. Semakin tingginya PDRB perkapita, menunjukkan adanya peningkatan kemakmuran maka dengan demikian dapat dikatakan pemekaran wilayah yang diiringi dengan adanya otonomi daerah menghasilkan pengaruh positif terhadap kemajuan kemakmuran masyarakat.

3.4. Struktur Ekonomi Tiga Sektor Utama

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor

ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk berasal dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dari suatu wilayah. Untuk dapat melihat keterbandingan struktur ekonomi kabupaten/kota, berikut ini disajikan ulasan mengenai distribusi persentase PDRB kabupaten/kota atas dasar harga berlaku tahun 2013-2015 yang dikelompokkan menjadi tiga sektor utama yakni sektor primer, sekunder dan tersier.

Sektor **primer** mencakup sektor pertanian (kategori A) dan pertambangan (kategori B). Sementara sektor **sekunder** meliputi sektor industri (kategori C), sektor listrik dan gas (kategori D), sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah

(kategori E) dan sektor konstruksi (kategori F). Selanjutnya sektor **tersier** meliputi sektor perdagangan (kategori G), sektor angkutan (kategori H), sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum (kategori I), sektor informasi dan komunikasi (kategori J) sektor jasa keuangan (sektor K) sektor real estate (kategori L), jasa perusahaan (kategori M dan N), administrasi pemerintahan dsb. (kategori O), jasa pendidikan (kategori P), jasa kesehatan (kategori Q) dan sektor jasa lainnya (kategori R,S,T dan U).

Pada tahun 2013-2015, sektor primer mendominasi menggerakkan roda perekonomian masyarakat kabupaten/kota di Riau. Hal ini terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti.

Tabel 3.4
Struktur Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota menurut
Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier, 2013-2015
 (%)

Kabupaten/Kota	2013			2014			2015*		
	Pri.	Sek.	Ter.	Pri.	Sek.	Ter.	Pri.	Sek.	Ter.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Kuantan Singingi	56,74	33,66	9,60	57,28	33,02	9,70	55,11	34,59	10,30
2. Indragiri Hulu	43,81	39,53	16,66	42,16	40,65	17,19	37,60	43,79	18,61
3. Indragiri Hilir	50,20	30,69	19,11	50,05	29,68	20,28	49,00	30,21	20,79
4. Pelalawan	40,51	52,30	7,20	40,42	52,02	7,56	39,97	52,50	7,53
5. Siak	34,50	58,82	6,69	34,40	58,20	7,40	34,36	58,25	7,39
6. Kampar	47,20	42,33	10,47	47,89	41,33	10,78	48,44	40,97	10,59
7. Rokan Hulu	59,08	26,95	13,97	59,36	26,74	13,90	58,50	27,60	13,90
8. Bengkalis	54,54	27,57	17,89	53,95	26,96	19,08	54,90	26,82	18,27
9. Rokan Hilir	61,96	28,47	9,57	62,98	27,04	9,97	63,80	26,30	9,90
10. Kep. Meranti	46,26	36,91	16,83	45,36	36,09	18,54	44,84	36,03	19,13
11. Pekanbaru	1,71	50,05	48,24	1,58	49,40	49,02	1,62	49,98	48,41
12. Dumai	10,23	42,66	47,11	10,25	41,89	47,87	10,28	42,40	47,32
Riau	39,57	41,01	19,42	39,31	40,22	20,47	38,97	40,46	20,56

Keterangan: *) Angka masih sementara

Sektor sekunder setiap tahunnya sangat kental mendominasi pada daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, dan Kota Pekanbaru masing-masing selama tahun 2015 mencatat peranan

dalam perekonomian kabupaten tersebut sebesar 43,79 persen, 52,50 persen, 58,25 persen dan 49,98 persen. Ini menunjukkan pembangunan ekonomi di empat kabupaten/kota tersebut dikuasai oleh

kemampuan sektor industrinya dalam menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu kondisi tersebut sebaiknya harus senantiasa didukung oleh kemudahan akan ketersediaan bahan baku dan infrastruktur yang memadai.

Kemudian sektor tersier ternyata berperan menonjol di Kota Dumai. Selama tiga tahun terakhir, peranan sektor tersier terhadap perekonomian Kota Dumai selalu di atas 47 persen.

Selanjutnya di Kota Dumai besaran sektor utama ini menggerakkan roda perekonomian selama tahun 2015 sebesar 47,32 persen. Meskipun berperan besar, selama 2013-2015, peran sektor tersier ini juga masih labil oleh karena kemapanan sumber daya masyarakat memasuki sektor ini masih belum merata dan stabil.

Secara umum perekonomian dari kabupaten/kota akan tergambar dengan jelas dalam struktur perekonomian Riau. Perekonomian masyarakat Riau sudah mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder. Hal ini terlihat dari besarnya peranan sektor sekunder yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sektor primer. Pada tahun 2015 tercatat sektor sekunder sebesar 40,46 persen dan sektor primernya menjadi 38,97 persen.

B. PDRB dengan Migas

Penyajian pembangunan ekonomi Riau belum lengkap bila menampilkan perkembangan ekonomi tanpa migas saja. Sebagai salah satu provinsi penghasil migas terbesar, perkembangan ekonomi dengan memasukkan unsur migas pada

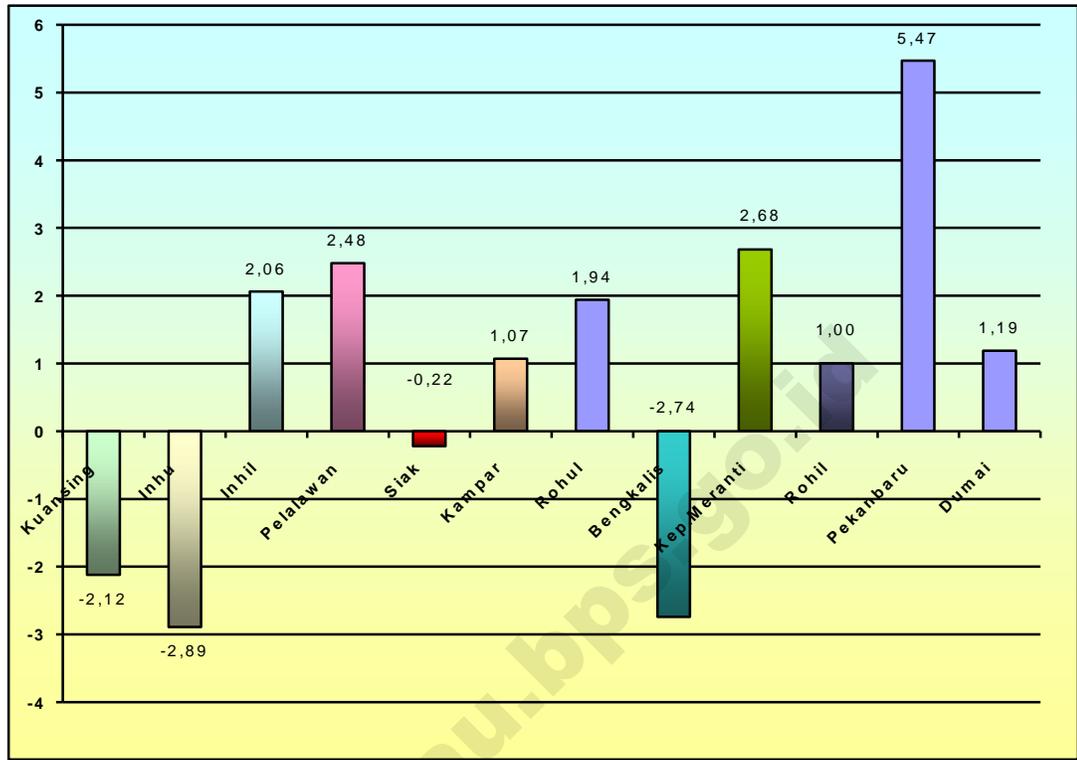
PDRB Riau menjadi sangat perlu untuk dipaparkan. Kemudian agar semakin lengkap akan dibahas juga gambaran seluruh potensi ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Selanjutnya melalui pendekatan produksi, akan dapat menghasilkan informasi tentang pertumbuhan ekonomi, kontribusi ekonomi dan PDRB per kapita di dalam PDRB kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

3.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Setelah unsur migas diperhitungkan ke dalam PDRB kabupaten/kota se-Provinsi Riau maka tampak keragaman pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut, khususnya kabupaten/kota yang memiliki sumber daya migas. Keragaman pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut timbul karena cukup berfluktuasinya produksi dan nilai tambah dari hasil migas tersebut.

Tabel 3.5 menyajikan pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Riau dengan memasukkan unsur migas ke dalam penghitungan PDRB. Alur ulasan tentang laju pertumbuhan ekonomi dengan migas kabupaten/kota se-Provinsi Riau akan sangat berbeda dibandingkan dengan ulasan tanpa memasukkan unsur migas. Perbedaan terletak pada kabupaten/kota yang memiliki produksi migas dan/atau yang melakukan pengolahan migas, seperti yang terjadi pada Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai.

Grafik 1
Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2015
 (%)



Selama 2013-2015 percepatan pertumbuhan ekonomi cenderung melemah. Pada kurun waktu tersebut harga minyak dunia yang berfluktuasi serta tingkat produksi migas yang mengalami banyak kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis mempengaruhi pergerakan ekonomi Riau. Selain itu kondisi beberapa sumur minyak yang sudah mulai menua juga mempengaruhi produksi migas.

Tabel 3.5 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Riau dengan migas senantiasa berfluktuatif tergantung dari tingkat kestabilan harga dan permintaan pasar dunia serta tingkat produksi yang didapatkan.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2013-2015
(%)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015*
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	5,47	5,14	-2,12
2. Indragiri Hulu	6,21	5,53	-2,89
3. Indragiri Hilir	7,17	6,86	2,06
4. Pelalawan	5,55	6,20	2,48
5. Siak	-2,33	-0,97	-0,22
6. Kampar	6,31	3,43	1,07
7. Rokan Hulu	5,99	6,44	1,94
8. Bengkalis	-3,27	-3,85	-2,74
9. Rokan Hilir	2,38	4,10	1,00
10. Kep. Meranti	4,24	4,44	2,68
11. Pekanbaru	5,59	6,89	5,47
12. Dumai	3,68	3,06	1,19
RIAU	2,48	2,70	0,22

Keterangan: *) Angka masih sementara

Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat ketidakstabilan migas pada tahun 2015 sebesar 0,22 persen secara umum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang memiliki kaitan dengan sumber daya migas yang besar. Kabupaten Indragiri Hulu tingkat pertumbuhannya -2,89 persen, Kabupaten Bengkalis sebesar -2,74 persen, Kabupaten Siak sebesar -0,22 persen, Kampar tumbuh sebesar 1,07 persen dan Rokan Hilir tumbuh hanya sebesar 1,00 persen. Besaran kontribusi migas yang sangat dominan dalam perekonomian dari

suatu kabupaten/kota maka apabila terjadi suatu ketidakstabilan yang berkenaan dengan kondisi migas akan berdampak langsung pada tingkat pertumbuhan ekonomi dengan migas di wilayah tersebut.

3.6. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota

Tabel 3.6 menampilkan struktur ekonomi dengan migas kabupaten/kota se-Provinsi Riau selama periode 2013-2015. Struktur ekonomi ini

sangat jelas menggambarkan kontribusi ekonomi kabupaten/kota yang memiliki sumber daya migas terhadap perekonomian Riau. Pada ulasan sebelumnya ternyata unsur migas sangat mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan perekonomian suatu wilayah di Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan betapa besarnya peranan migas dalam perekonomian, untuk itu bagi wilayah kabupaten/kota yang memiliki migas akan terlihat nyata kontribusinya dalam perekonomian Riau, artinya dengan adanya produksi migas maka peningkatan kemampuan kabupaten/kota tersebut menjadi lebih dominan terhadap penciptaan barang dan jasa dalam Provinsi Riau.

Oleh karena itu dengan kondisi penurunan tingkat produksi migas yang berkecenderungan sangat cepat ini perlu peningkatan frekuensi pengevaluasian dan penajaman evaluasi hingga ke maslahatan yang lebih mendasar. Tidak tertutup

kemungkinan melakukan penataan ulang pengkajian Sumber Daya Alam (SDA) agar semakin efektif dan efisien sehingga akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Riau.

Tampak dari Tabel 3.6 bahwa kabupaten-kabupaten yang memiliki unsur minyak seperti Kabupaten Bengkalis masih menjadi penyumbang terbesar terhadap ekonomi Riau, dengan peran sebesar 20,80 persen di tahun 2015. Kondisi ini dikarenakan daerah Kabupaten Bengkalis paling besar dalam menghasilkan minyak bumi. Kemudian diikuti oleh kontribusi kabupaten/kota lain yang termasuk besar kontribusi migasnya, seperti Kabupaten Siak (11,87 persen), Rokan Hilir (10,79 persen), dan Kampar (10,17 persen). Dominasi keempat kabupaten/kota tersebut mencapai 53,63 persen dalam membentuk PDRB dengan migas di provinsi Riau.

Tabel 3.6
Distribusi Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2013-2015 (%)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015*
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	3,55	3,56	3,87
2. Indragiri Hulu	4,93	5,00	5,31
3. Indragiri Hilir	6,84	7,08	7,95
4. Pelalawan	5,12	5,28	6,01
5. Siak	13,56	12,71	11,87
6. Kampar	10,16	10,19	10,17
7. Rokan Hulu	3,57	3,73	4,13
8. Bengkalis	25,86	24,57	20,80
9. Rokan Hilir	10,76	11,11	10,79
10. Kep. Meranti	2,16	2,24	2,32
11. Pekanbaru	9,99	10,99	12,90
12. Dumai	3,51	3,52	3,89
RIAU	100,00	100,00	100,00

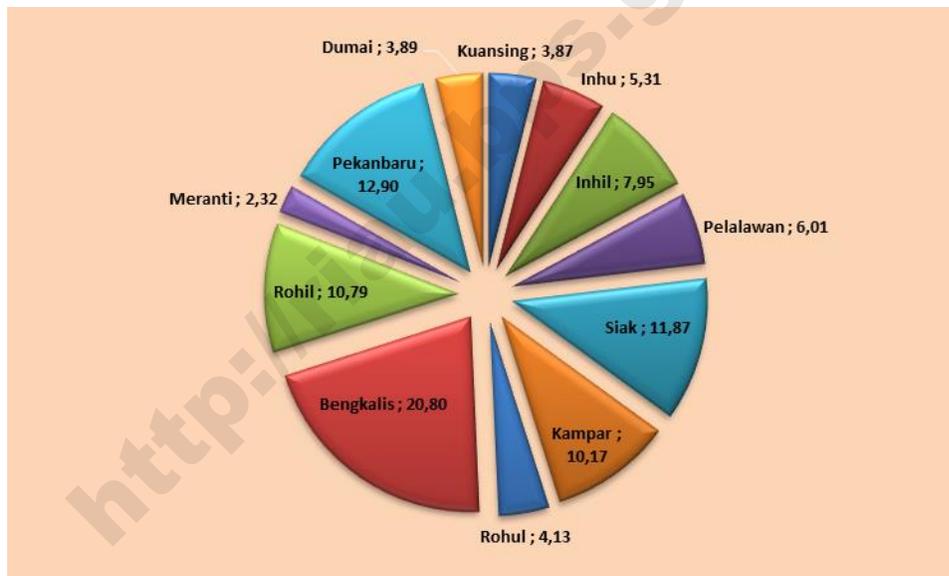
Keterangan: *) Angka masih sementara

Kemudian Kota Pekanbaru memberikan kontribusi terhadap perekonomian Riau sebesar 12,90 persen. Besarnya kontribusi Kota Pekanbaru ini didukung oleh kekuatan aktivitas perekonomian di luar migas, yakni sektor sekunder. Selanjutnya kabupaten/kota yang juga berkontribusi cukup tinggi terhadap perekonomian di Riau selain Kota Pekanbaru adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

Secara umum adanya peran SDA migas di kabupaten/kota mengubah komposisi kontribusi ekonomi tanpa migas dari suatu kabupaten/kota terhadap perekonomian Riau. Sebelumnya kontribusi

ekonomi tanpa migas terbesar berada di Pekanbaru dan Siak. Selanjutnya dengan memasukkan unsur migas dalam perekonomian maka kedua kota ini menjadi kecil besaran sumbangannya terhadap perekonomian Riau. Besar sumbangan Kota Pekanbaru telah disebutkan di atas dan Kabupaten Siak hanya sebesar 11,87 persen.

Grafik 2
Struktur Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2015 (%)



Namun demikian, ada beberapa kabupaten yang memiliki migas ternyata dalam memberi kontribusi terhadap ekonomi Riau masih relatif rendah. Hal ini akibat kuantitas produksi migas yang dimiliki oleh kabupaten tersebut juga rendah terhadap total produksi migas Riau. Beberapa kabupaten yang dimaksud seperti kontribusi

Indragiri Hulu sebesar 5,31 persen, Pelalawan sebesar 6,01 persen, Rokan Hulu sekitar 4,13 persen, Kepulauan Meranti sebesar 2,32 persen, dan Kota Dumai sebesar 3,89 persen.

3.7. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota

Tabel 3.7 menunjukkan perkembangan PDRB per kapita harga berlaku kabupaten/kota se- Provinsi Riau yang cenderung fluktuatif selama periode 2013-2015. Perkembangan ini mencerminkan seberapa tinggi tingkat (*level*) kemakmuran yang telah dicapai oleh penduduk kabupaten/kota se-

Provinsi Riau pada periode tersebut. Dengan perkembangan tingkat PDRB per kapita ini dapat diinterpretasikan secara rata-rata tingkat kecenderungan kemakmuran masyarakatnya apakah semakin membaik atau sebaliknya.

Tabel 3.7
PDRB Perkapita dengan Migas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau,
2013-2015 (Juta Rp)

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2013	2014	2015*	2013	2014	2015*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kuantan Singingi	70,02	77,33	80,16	63,04	65,45	63,32
2. Indragiri Hulu	76,14	84,22	84,50	64,18	66,28	63,03
3. Indragiri Hilir	60,45	68,85	73,60	50,72	53,49	53,89
4. Pelalawan	86,59	94,58	98,72	76,38	77,03	75,00
5. Siak	197,29	200,32	175,41	124,88	120,15	116,53
6. Kampar	81,65	89,01	83,57	58,80	59,26	58,39
7. Rokan Hulu	39,68	44,33	45,39	35,11	35,85	35,08
8. Bengkalis	296,68	309,43	249,10	167,47	158,55	151,98
9. Rokan Hilir	106,92	119,61	109,08	69,54	70,38	69,16
10. Kep. Meranti	73,26	84,09	83,62	57,76	59,97	61,17
11. Pekanbaru	61,43	73,39	80,95	51,85	53,95	55,44
12. Dumai	77,46	84,85	88,64	71,53	72,13	71,50
R i a u	100,69	109,78	102,83	72,30	72,39	70,76

Keterangan: *) Angka masih sementara

Dari Tabel 3.7, di tingkat provinsi angka PDRB perkapita dengan migas berdasarkan atas harga berlaku meningkat dari Rp 100,69 juta di tahun 2013 menjadi Rp 109,78 juta pada tahun 2014, namun turun menjadi 102,83 juta pada tahun 2015. Sementara pada tingkat kabupaten/kota juga memiliki kecenderungan yang terus meningkat pada periode tersebut khususnya kabupaten/kota yang tidak mengandalkan sektor migas, Sedangkan

kabupaten yang berkontribusi sektor migas cukup besar justru mengalami penurunan. Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Rokan Hilir menempati tiga teratas yakni masing-masing sebesar Rp 249,10 juta, Rp 175,41 juta dan Rp 109,08 juta di tahun 2015. Lalu diikuti oleh Kabupaten Pelalawan, Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu, berturut-turut mencapai, Rp 98,72 juta, Rp 88,64 juta dan Rp 84,50 juta.

Dan jika kita lihat secara riil (konstan 2010), nilai PDRB perkapita provinsi Riau tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2014.

<http://riau.bps.go.id>

Lampiran

Tabel-Tabel Pokok

<http://www.ips.com>

Tabel 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.962.462,31	9.529.321,49	10.058.261,73	11.467.111,02	12.466.395,22
B	Pertambangan dan Penggalian	1.791.336,33	2.014.346,19	2.126.933,21	2.291.269,13	1.417.520,96
C	Industri Pengolahan	4.413.916,44	5.039.976,47	5.640.113,33	6.189.459,35	6.771.915,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.115,08	4.156,62	3.639,26	5.448,31	7.939,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.501,56	4.744,36	4.714,26	4.983,08	5.518,16
F	Konstruksi	1.310.109,44	1.458.186,43	1.581.641,19	1.731.062,79	1.929.239,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	634.713,72	698.995,83	746.208,28	906.345,04	993.440,43
H	Transportasi dan Pergudangan	65.933,64	73.843,48	88.352,09	102.567,77	122.651,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.535,67	33.567,13	39.324,66	47.544,40	54.685,53
J	Informasi dan Komunikasi	68.322,89	76.618,49	81.361,41	83.394,05	96.071,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	88.828,96	119.258,45	141.796,45	157.346,90	154.581,67
L	Real Estate	114.579,31	130.338,08	145.553,66	162.053,60	191.496,20
M,N	Jasa Perusahaan	154,17	173,93	195,18	224,67	255,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	477.910,47	561.976,14	586.894,03	605.225,91	660.455,54
P	Jasa Pendidikan	97.376,06	108.422,00	118.015,19	130.186,08	154.379,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25.598,62	28.428,91	32.403,43	38.790,23	47.760,37
R,S,T,U	Jasa lainnya	68.785,74	70.343,57	81.312,31	97.274,12	118.785,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		18.157.180,42	19.952.697,57	21.476.719,67	24.020.286,43	25.193.090,85
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		18.157.180,42	19.952.697,57	21.476.719,67	24.020.286,43	25.193.090,85

Tabel 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.487.455,52	8.794.838,58	9.064.999,42	9.516.810,88	9.588.045,39
B	Pertambangan dan Penggalian	1.711.560,11	1.870.594,76	1.963.532,05	2.079.161,05	1.123.496,78
C	Industri Pengolahan	4.316.688,39	4.711.283,40	5.244.747,01	5.582.577,93	5.890.444,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.189,51	4.315,73	4.692,43	6.210,64	6.707,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.253,84	4.325,80	4.338,15	4.391,12	4.486,33
F	Konstruksi	1.199.091,19	1.217.342,22	1.237.998,87	1.261.373,27	1.333.550,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	598.413,76	647.781,92	674.462,05	699.250,99	707.193,51
H	Transportasi dan Pergudangan	62.994,24	70.032,14	75.109,25	81.415,17	90.760,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27.480,11	30.265,52	32.667,06	35.509,28	38.149,45
J	Informasi dan Komunikasi	66.457,50	71.336,98	73.903,20	74.483,71	77.337,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	84.169,81	102.718,57	115.628,18	121.991,32	115.193,00
L	Real Estate	110.124,80	118.655,51	127.003,08	133.041,81	144.040,67
M,N	Jasa Perusahaan	146,59	156,17	166,69	178,85	192,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	456.057,94	502.135,92	515.749,55	520.176,32	546.691,96
P	Jasa Pendidikan	90.931,18	95.535,13	100.219,32	104.306,91	112.509,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24.398,72	26.344,69	28.737,00	31.284,65	34.490,74
R,S,T,U	Jasa lainnya	62.592,89	65.535,87	72.980,38	78.990,92	85.975,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.307.006,10	18.333.198,91	19.336.933,71	20.331.154,81	19.899.265,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		17.307.006,10	18.333.198,91	19.336.933,71	20.331.154,81	19.899.265,75

Tabel 3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN INDRAGIRI HULU ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.167.469,57	7.721.106,41	8.056.364,46	9.156.680,79	10.016.147,27
B	Pertambangan dan Penggalian	4.343.867,24	5.254.106,18	5.809.953,09	5.968.694,74	3.735.297,95
C	Industri Pengolahan	5.991.487,95	6.754.445,19	7.583.812,33	8.795.083,59	9.700.474,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.522,15	6.106,69	6.288,13	10.074,33	15.069,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.829,30	14.993,21	14.341,94	14.801,06	15.492,97
F	Konstruksi	3.012.795,19	3.305.429,74	3.654.689,47	4.277.275,18	4.897.100,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	2.119.704,92	2.362.115,38	2.539.709,10	3.066.429,49	3.468.570,58
H	Transportasi dan Pergudangan	261.963,50	283.130,69	307.790,51	341.715,09	380.291,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	175.594,81	198.567,46	215.626,38	252.940,31	277.825,03
J	Informasi dan Komunikasi	147.692,30	165.116,49	173.461,66	190.621,82	214.189,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	249.823,67	276.204,55	289.245,93	318.959,51	325.640,45
L	Real Estate	264.393,21	295.761,96	325.773,36	382.293,35	439.097,62
M,N	Jasa Perusahaan	698,39	775,63	890,24	1.004,25	1.129,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	431.555,78	467.881,09	491.541,01	518.143,56	560.355,60
P	Jasa Pendidikan	166.395,31	182.745,93	195.987,78	217.552,47	252.634,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36.787,16	40.909,46	46.163,89	55.368,21	67.777,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	132.376,16	142.024,84	160.643,16	195.344,03	229.195,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		24.522.956,63	27.471.420,89	29.872.282,45	33.762.981,76	34.596.290,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		23.627.330,16	26.275.395,43	28.484.734,68	32.222.431,90	33.406.212,55

Tabel 4. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN INDRAGIRI HULU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.504.766,84	6.828.588,82	6.999.186,36	7.460.810,01	7.616.609,27
B	Pertambangan dan Penggalian	3.618.908,00	4.085.490,18	4.310.700,84	4.421.590,93	2.620.767,93
C	Industri Pengolahan	5.420.948,97	6.089.834,63	6.821.297,15	7.283.114,66	7.757.533,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.145,75	7.444,51	8.231,89	11.194,09	12.178,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.688,78	13.990,24	14.014,14	14.057,77	14.343,71
F	Konstruksi	2.613.344,41	2.735.820,90	2.862.416,54	3.047.581,75	3.238.451,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	1.953.865,38	2.110.012,54	2.241.890,44	2.304.464,39	2.408.837,55
H	Transportasi dan Pergudangan	239.327,42	251.809,87	264.902,08	280.230,92	297.515,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	157.765,37	172.272,03	181.231,98	192.783,99	199.698,03
J	Informasi dan Komunikasi	138.775,44	151.026,04	153.655,47	164.088,68	177.175,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	235.280,97	238.149,53	237.050,30	249.551,07	244.992,95
L	Real Estate	245.833,63	264.948,90	283.351,43	304.999,48	327.850,30
M,N	Jasa Perusahaan	673,60	715,39	761,93	812,76	866,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	414.758,08	430.750,40	448.363,60	458.064,39	478.779,16
P	Jasa Pendidikan	148.119,83	155.552,20	164.039,72	171.959,03	183.477,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35.660,29	38.809,11	42.300,84	45.492,11	49.981,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	125.261,32	133.244,06	146.735,26	162.100,35	175.923,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		21.874.124,08	23.708.459,37	25.180.129,97	26.572.896,38	25.804.981,98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		21.296.906,03	23.086.119,60	24.562.601,37	25.954.462,47	25.189.419,58

Tabel 5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.255.295,73	18.802.265,98	20.474.836,76	23.579.654,60	25.053.880,08
B	Pertambangan dan Penggalian	149.586,76	174.348,62	326.368,14	353.736,85	325.049,65
C	Industri Pengolahan	8.347.049,00	9.444.933,59	10.528.738,45	11.725.636,60	12.853.000,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.332,49	14.154,29	12.943,91	14.558,50	19.898,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.977,19	6.920,52	6.688,51	6.785,26	7.229,40
F	Konstruksi	1.645.935,14	1.894.797,77	2.170.526,71	2.445.044,46	2.769.020,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	4.536.952,49	4.979.216,14	5.277.337,04	6.731.766,42	7.453.431,50
H	Transportasi dan Pergudangan	322.663,15	376.296,50	430.552,85	496.296,92	564.488,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	144.182,38	162.193,77	180.893,27	204.242,08	221.687,65
J	Informasi dan Komunikasi	175.784,51	206.138,60	239.289,78	255.745,92	292.744,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	180.638,50	227.697,94	256.261,71	305.598,33	303.462,91
L	Real Estate	241.175,47	275.906,99	305.992,93	343.074,48	403.485,62
M,N	Jasa Perusahaan	862,68	961,02	1.068,06	1.291,43	1.438,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	635.548,77	774.155,62	826.550,07	878.536,08	956.816,51
P	Jasa Pendidikan	160.354,29	173.023,48	192.446,59	237.455,79	281.775,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39.058,62	43.546,87	49.036,17	57.867,17	70.479,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	125.480,34	138.339,06	158.246,78	184.387,48	218.287,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		33.979.877,52	37.694.896,75	41.437.777,71	47.821.678,35	51.796.177,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		33.979.877,52	37.694.896,75	41.437.777,71	47.821.678,35	51.796.177,00

Tabel 6. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.824.832,12	15.641.251,93	16.368.365,90	17.633.724,09	17.755.869,97
B	Pertambangan dan Penggalian	137.425,89	147.852,73	281.664,28	299.857,32	235.796,48
C	Industri Pengolahan	7.713.819,55	8.674.781,14	9.632.728,01	10.160.173,73	10.481.803,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.190,22	12.894,11	13.542,29	14.573,87	15.494,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.450,32	5.631,94	5.651,31	5.691,78	5.852,23
F	Konstruksi	1.410.346,96	1.519.130,46	1.629.661,58	1.751.925,10	1.856.197,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	4.088.055,90	4.390.458,40	4.630.909,75	4.940.133,85	5.103.141,62
H	Transportasi dan Pergudangan	292.107,27	319.515,12	349.009,20	378.776,95	397.815,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131.561,11	143.047,49	154.351,85	165.282,91	170.601,33
J	Informasi dan Komunikasi	155.012,80	180.982,09	202.862,82	214.559,23	233.742,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	169.455,91	199.381,74	214.403,78	243.255,13	230.171,55
L	Real Estate	222.334,82	238.727,56	257.307,73	273.708,53	297.027,91
M,N	Jasa Perusahaan	799,70	856,44	920,18	990,51	1.054,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	610.124,87	657.574,28	690.298,58	705.865,24	748.974,93
P	Jasa Pendidikan	142.746,51	151.281,32	161.418,69	173.699,42	185.217,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35.990,10	38.596,15	41.668,05	45.304,84	49.848,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	114.274,58	122.495,49	134.744,22	148.278,41	153.447,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		30.066.528,62	32.444.458,39	34.769.508,24	37.155.800,90	37.922.056,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		30.066.528,62	32.444.458,39	34.769.508,24	37.155.800,90	37.922.056,74

Tabel 7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PELALAWAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.239.434,11	11.096.002,23	12.020.964,20	13.806.857,14	15.101.167,09
B	Pertambangan dan Penggalian	707.506,73	918.015,08	1.147.354,12	1.297.251,53	1.164.739,11
C	Industri Pengolahan	13.864.483,18	14.542.200,12	15.061.503,96	17.228.534,24	19.194.975,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.045,06	4.282,31	4.331,21	6.229,83	9.158,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.136,26	2.408,47	2.418,24	2.504,07	2.658,70
F	Konstruksi	478.473,48	534.574,71	623.083,02	725.736,10	843.015,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	677.884,77	814.016,24	890.704,55	1.226.371,29	1.342.618,93
H	Transportasi dan Pergudangan	50.865,40	56.396,13	66.891,22	79.145,81	91.112,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38.515,39	44.856,81	52.624,35	64.445,23	72.018,58
J	Informasi dan Komunikasi	117.989,36	131.520,11	144.207,84	161.116,07	184.395,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	147.419,30	186.225,02	229.820,20	214.766,89	206.117,17
L	Real Estate	136.189,14	155.046,14	181.240,99	210.712,16	241.798,13
M,N	Jasa Perusahaan	293,12	331,90	372,40	426,32	475,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	294.150,16	342.889,30	379.616,35	402.092,65	435.114,07
P	Jasa Pendidikan	73.046,74	83.526,98	95.640,14	111.199,79	130.840,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30.622,24	34.707,87	39.779,97	46.513,37	57.420,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	57.780,14	66.694,42	78.181,64	94.524,37	113.602,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		26.920.834,59	29.013.693,83	31.018.734,42	35.678.426,84	39.191.229,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		26.321.502,80	28.215.883,49	30.004.749,43	34.530.435,95	38.191.197,70

Tabel 8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PELALAWAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.589.442,63	10.006.246,89	10.477.340,05	11.068.289,57	11.073.845,39
B	Pertambangan dan Penggalian	553.852,92	584.835,73	624.379,79	644.835,94	650.800,18
C	Industri Pengolahan	13.056.945,33	13.178.118,52	13.909.438,66	14.842.336,12	15.422.798,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.171,79	4.520,54	5.008,76	6.511,64	7.115,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.993,65	2.101,21	2.105,53	2.155,34	2.203,90
F	Konstruksi	461.873,39	499.181,23	546.921,42	600.379,89	655.093,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	580.946,93	638.845,93	692.037,24	752.324,29	776.166,24
H	Transportasi dan Pergudangan	49.536,44	53.896,71	57.769,01	62.311,44	66.412,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.711,27	39.664,07	42.398,86	45.811,07	47.847,43
J	Informasi dan Komunikasi	117.241,54	129.764,04	141.135,69	151.863,84	163.815,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	139.600,33	160.240,96	187.178,08	167.239,04	152.299,34
L	Real Estate	127.398,53	145.459,48	159.492,32	174.585,87	188.605,49
M,N	Jasa Perusahaan	283,42	304,97	323,93	349,32	371,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	288.355,86	312.278,29	335.744,14	342.845,13	356.521,36
P	Jasa Pendidikan	68.443,29	73.233,76	78.236,41	84.908,28	92.214,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29.266,81	31.770,43	34.192,72	36.601,62	40.247,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	55.038,79	60.416,48	66.936,32	73.441,54	79.652,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		25.161.102,94	25.920.879,25	27.360.638,95	29.056.789,93	29.776.010,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		24.713.373,11	25.450.353,03	26.858.841,11	28.544.386,65	29.265.073,28

Tabel 9. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SIAK ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.397.312,15	11.144.208,75	11.621.360,01	12.897.667,78	13.341.292,71
B	Pertambangan dan Penggalian	31.804.311,86	42.175.031,33	42.292.629,24	41.157.661,95	30.039.629,15
C	Industri Pengolahan	20.718.417,92	20.952.561,53	22.575.616,32	25.205.050,02	26.896.773,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.724,60	3.372,19	2.787,78	3.436,65	4.635,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.182,43	2.306,73	2.319,78	2.412,32	2.702,75
F	Konstruksi	2.314.732,18	2.466.944,97	2.754.976,14	2.985.731,35	3.218.294,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	784.770,57	892.247,77	1.016.692,25	1.450.723,00	1.504.083,11
H	Transportasi dan Pergudangan	47.716,14	53.753,63	60.680,09	67.150,47	74.928,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.393,00	20.239,13	24.461,41	30.181,80	33.007,00
J	Informasi dan Komunikasi	93.560,21	109.943,94	126.834,85	137.777,72	150.848,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	120.536,52	186.627,06	224.310,45	275.763,53	264.946,90
L	Real Estate	169.869,74	215.138,07	236.853,44	276.428,61	303.008,41
M,N	Jasa Perusahaan	2.222,45	2.666,91	3.148,14	3.776,30	4.089,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	429.648,42	492.748,18	528.067,89	556.838,37	600.349,17
P	Jasa Pendidikan	255.377,49	272.910,25	297.735,06	341.319,87	372.611,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80.783,12	92.967,14	102.293,98	121.435,37	146.885,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	206.028,60	219.759,93	258.957,60	322.214,04	367.749,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		67.446.587,39	79.303.427,52	82.129.724,43	85.835.569,17	77.325.835,33
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		38.382.130,24	40.305.122,58	43.074.856,35	48.447.423,91	51.716.263,09

Tabel 10. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SIAK ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.706.949,22	10.041.923,36	10.201.456,59	10.700.570,98	10.634.876,20
B	Pertambangan dan Penggalian	20.703.075,52	20.780.997,30	17.877.016,04	15.919.549,64	14.906.724,79
C	Industri Pengolahan	17.913.880,26	18.277.899,41	19.524.775,25	20.295.907,79	21.072.622,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.854,83	2.240,94	2.519,12	2.881,32	3.224,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.201,73	2.208,35	2.209,69	2.230,24	2.294,39
F	Konstruksi	1.751.530,17	1.840.578,84	1.895.824,97	1.946.645,45	2.070.267,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	740.514,79	807.153,81	888.228,73	922.666,00	929.336,20
H	Transportasi dan Pergudangan	43.851,94	47.794,49	50.950,43	52.981,61	56.311,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.580,08	17.224,30	19.099,79	19.849,45	20.625,28
J	Informasi dan Komunikasi	91.266,02	104.337,33	121.212,12	126.602,68	133.519,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	112.493,58	158.111,94	181.182,11	211.121,90	194.399,31
L	Real Estate	149.917,51	175.473,18	188.312,44	204.585,97	219.179,53
M,N	Jasa Perusahaan	2.136,66	2.346,17	2.520,05	2.729,13	2.823,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	424.781,47	456.443,71	483.113,60	493.055,69	513.349,46
P	Jasa Pendidikan	226.098,39	236.314,76	247.186,27	248.271,21	250.118,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75.045,17	81.078,26	86.975,31	93.611,64	102.594,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	185.752,23	194.672,28	215.091,46	241.777,75	257.351,63
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		52.146.929,56	53.226.798,43	51.987.673,97	51.485.038,44	51.369.618,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		33.530.068,14	34.546.110,12	36.245.779,58	37.806.180,44	38.776.655,50

Tabel 11. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KAMPAR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.049.949,22	12.888.944,64	13.636.647,44	15.347.655,66	16.493.085,93
B	Pertambangan dan Penggalian	18.698.542,15	22.889.081,79	28.026.208,33	31.556.994,58	25.993.640,08
C	Industri Pengolahan	10.104.962,47	11.269.941,15	12.524.987,69	13.519.605,58	14.565.372,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.240,64	20.756,12	16.305,12	20.738,64	27.718,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.893,63	3.056,43	3.083,63	3.189,03	3.545,53
F	Konstruksi	2.311.714,17	2.911.002,73	3.371.882,95	3.837.039,44	4.305.275,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	1.215.961,19	1.397.266,92	1.547.848,27	1.921.933,72	2.067.904,44
H	Transportasi dan Pergudangan	120.365,88	131.406,13	142.294,62	156.825,45	183.860,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34.886,73	39.944,27	43.219,81	47.046,41	52.190,33
J	Informasi dan Komunikasi	175.113,69	194.376,19	209.926,29	226.224,08	246.012,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	175.287,32	188.630,98	221.937,62	257.657,96	260.465,95
L	Real Estate	387.330,26	439.936,59	475.331,52	539.261,46	594.528,03
M,N	Jasa Perusahaan	1.279,23	1.487,74	1.679,56	1.984,85	2.158,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	714.102,05	798.653,28	847.065,54	870.965,26	892.456,10
P	Jasa Pendidikan	214.384,15	224.056,41	236.780,92	261.174,35	295.403,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63.007,16	70.267,94	78.129,38	91.503,26	115.990,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	105.677,35	115.196,86	132.179,64	157.010,26	175.460,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		46.392.697,29	53.584.006,16	61.515.508,33	68.816.810,00	66.275.069,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		31.222.644,29	34.589.247,32	37.603.168,79	42.053.100,28	46.135.869,62

Tabel 12. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KAMPAR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.602.689,90	12.004.555,69	12.380.412,04	12.984.986,36	13.043.881,11
B	Pertambangan dan Penggalian	12.756.583,80	13.221.181,32	13.819.943,13	13.880.141,99	13.921.701,14
C	Industri Pengolahan	9.741.792,12	10.693.182,44	11.966.078,23	12.476.389,30	12.668.783,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.427,86	15.056,25	15.703,89	18.986,46	20.177,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.792,38	2.805,25	2.810,61	2.843,31	2.902,06
F	Konstruksi	2.209.950,91	2.482.749,44	2.670.876,93	2.857.494,47	3.004.099,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	1.142.076,58	1.217.058,88	1.318.279,47	1.390.105,06	1.399.614,57
H	Transportasi dan Pergudangan	117.226,95	121.734,66	125.239,41	128.872,49	139.482,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33.332,82	34.507,81	35.476,89	36.322,43	37.731,73
J	Informasi dan Komunikasi	172.110,44	182.713,75	190.965,89	197.505,21	202.255,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	174.079,69	182.482,58	203.656,49	221.798,98	213.960,41
L	Real Estate	359.263,68	397.551,59	412.427,11	431.255,65	450.362,92
M,N	Jasa Perusahaan	1.253,25	1.359,95	1.462,55	1.608,00	1.659,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	687.973,57	734.510,11	756.655,21	766.088,32	760.539,58
P	Jasa Pendidikan	199.716,03	204.517,51	208.852,69	215.569,74	220.120,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.221,24	65.344,87	69.805,32	75.139,43	82.164,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	101.815,14	107.234,59	118.936,94	131.358,63	135.146,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		39.378.306,37	41.668.546,69	44.297.582,79	45.816.465,83	46.304.581,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		29.787.397,73	31.932.910,80	34.124.190,54	35.775.605,73	36.318.849,89

Tabel 13. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ROKAN HULU ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.081.246,93	10.951.860,97	11.687.739,14	13.544.979,34	14.420.666,80
B	Pertambangan dan Penggalian	1.253.887,94	1.445.184,53	1.490.200,94	1.943.681,95	1.683.176,47
C	Industri Pengolahan	3.866.173,05	4.286.317,32	4.799.155,36	5.505.595,53	6.176.381,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.150,58	10.065,52	10.019,41	10.918,66	16.428,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.500,76	1.612,48	1.623,12	1.731,20	1.933,87
F	Konstruksi	584.684,84	672.480,70	766.016,69	874.146,32	973.386,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	872.719,30	967.370,84	1.072.297,44	1.327.703,25	1.439.490,70
H	Transportasi dan Pergudangan	86.121,98	91.121,31	103.283,97	120.568,52	139.555,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52.179,12	59.116,99	68.391,62	85.983,32	93.345,93
J	Informasi dan Komunikasi	183.703,55	198.906,39	205.833,07	220.182,44	240.326,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	149.486,08	198.506,80	256.416,46	272.689,33	263.448,49
L	Real Estate	124.009,91	133.290,47	146.079,39	165.910,66	187.583,03
M,N	Jasa Perusahaan	815,05	945,48	1.034,84	1.238,22	1.314,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	637.879,57	749.480,26	814.836,57	865.082,98	932.866,75
P	Jasa Pendidikan	80.562,94	86.432,49	93.478,65	108.272,46	126.607,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32.470,59	36.090,87	39.533,14	46.280,12	55.224,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	74.325,68	78.088,01	89.475,65	110.332,22	131.028,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		18.092.917,87	19.966.871,41	21.645.415,45	25.205.296,52	26.882.765,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		17.312.204,55	19.025.183,78	20.691.095,98	23.907.911,04	25.975.045,03

Tabel 14. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ROKAN HULU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.628.622,98	10.148.445,56	10.576.371,33	11.196.878,21	11.117.572,42
B	Pertambangan dan Penggalian	944.803,58	930.121,53	894.627,81	1.011.595,08	1.030.079,36
C	Industri Pengolahan	3.740.183,53	4.093.126,81	4.579.622,66	4.950.125,40	5.302.980,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.808,23	14.113,74	14.492,19	11.900,50	13.075,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.489,68	1.575,95	1.578,14	1.594,48	1.631,48
F	Konstruksi	534.153,89	551.167,18	572.353,98	595.160,48	620.760,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	816.098,30	875.051,60	944.173,27	992.591,97	1.015.469,70
H	Transportasi dan Pergudangan	85.433,32	89.437,71	94.852,99	100.680,98	107.105,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	48.695,76	50.316,66	52.509,96	54.805,41	56.435,70
J	Informasi dan Komunikasi	182.662,37	194.108,86	208.681,84	218.008,09	228.084,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	141.507,48	171.391,61	209.753,15	212.257,00	197.134,97
L	Real Estate	116.447,70	123.500,92	131.094,02	138.220,80	146.539,90
M,N	Jasa Perusahaan	777,87	822,80	869,19	915,98	933,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	604.114,93	650.143,81	681.436,82	697.064,59	724.558,93
P	Jasa Pendidikan	70.446,38	73.204,46	76.500,87	79.783,35	83.688,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30.786,57	32.412,10	34.360,54	36.211,20	39.519,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	67.684,02	70.112,20	77.282,75	85.469,59	93.395,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.026.716,57	18.069.053,50	19.150.561,51	20.383.263,11	20.778.966,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		16.538.831,18	17.618.513,41	18.759.474,20	19.907.427,62	20.310.888,85

Tabel 15. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BENGKALIS ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.164.576,21	7.592.307,38	7.964.979,37	9.045.114,89	10.103.901,44
B	Pertambangan dan Penggalian	#####	116.612.049,81	129.003.600,63	133.081.461,54	99.125.944,50
C	Industri Pengolahan	8.959.548,36	9.609.953,88	10.952.175,45	12.680.272,68	14.052.533,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.597,20	8.552,46	8.395,03	11.694,49	16.776,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.671,62	10.427,72	10.075,17	10.678,42	11.764,48
F	Konstruksi	1.550.444,10	1.829.378,29	2.133.810,11	2.561.565,53	2.933.889,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	3.166.913,31	3.787.839,92	4.101.748,29	5.730.958,87	6.153.984,30
H	Transportasi dan Pergudangan	162.820,74	179.958,91	202.113,56	232.925,47	270.793,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	120.400,51	145.080,46	203.135,45	283.649,12	298.471,11
J	Informasi dan Komunikasi	175.216,87	212.579,52	242.240,18	289.423,46	335.007,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	225.335,71	244.855,00	276.533,19	293.312,94	288.467,64
L	Real Estate	202.802,36	219.263,93	235.195,12	265.454,36	302.679,86
M,N	Jasa Perusahaan	1.785,07	2.229,80	2.622,67	3.125,22	3.560,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	724.459,22	804.058,84	873.048,43	907.407,33	1.002.245,10
P	Jasa Pendidikan	178.827,12	190.503,75	204.737,96	250.426,38	298.497,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42.583,60	50.264,51	57.085,45	67.996,71	84.519,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	125.405,86	133.732,58	152.944,21	183.169,13	221.618,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		#####	141.633.036,77	156.624.440,27	165.898.636,53	135.504.653,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		31.150.852,89	34.109.676,72	36.612.625,59	44.579.050,85	50.677.424,10

Tabel 16. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BENGKALIS ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.773.651,26	7.007.240,20	7.148.402,63	7.438.546,17	7.440.747,66
B	Pertambangan dan Penggalian	70.220.967,74	67.669.455,65	63.507.539,51	58.824.076,35	55.844.533,39
C	Industri Pengolahan	8.720.758,49	9.724.801,69	10.198.767,98	10.777.965,24	11.099.712,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.972,80	11.652,71	12.122,52	13.170,27	13.887,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.792,56	9.873,85	9.950,71	10.119,33	10.408,36
F	Konstruksi	1.418.715,75	1.526.766,98	1.654.406,05	1.769.486,45	1.925.919,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	2.993.656,67	3.473.828,56	3.750.308,58	3.929.206,29	4.003.197,26
H	Transportasi dan Pergudangan	157.007,10	168.791,03	181.385,15	194.781,18	204.186,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	114.600,29	127.462,35	150.996,95	166.577,45	170.817,69
J	Informasi dan Komunikasi	174.474,67	209.553,92	251.511,84	282.516,00	305.156,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	213.247,03	211.165,33	226.194,54	228.363,66	215.770,85
L	Real Estate	188.566,27	196.420,58	204.568,21	211.277,87	225.155,78
M,N	Jasa Perusahaan	1.705,00	1.921,51	2.164,51	2.402,55	2.608,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	689.662,76	726.688,92	756.011,78	773.095,85	799.409,32
P	Jasa Pendidikan	157.586,65	164.855,76	172.119,13	180.503,13	194.915,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40.372,84	44.172,94	49.016,42	53.118,08	58.434,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	113.551,41	122.358,79	135.619,08	148.490,85	161.547,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		91.999.289,29	91.397.010,80	88.411.085,59	85.003.696,73	82.676.408,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		29.805.853,47	32.007.592,96	33.750.418,34	35.904.236,37	37.076.175,02

Tabel 17. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.159.293,84	14.579.016,67	15.715.859,33	18.408.295,49	20.665.359,12
B	Pertambangan dan Penggalian	26.864.409,24	32.825.387,70	36.589.908,39	41.890.579,19	33.482.761,45
C	Industri Pengolahan	6.662.135,57	8.192.786,00	9.187.091,28	10.179.158,07	11.062.292,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.065,50	6.138,10	6.064,83	9.504,24	13.134,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.107,69	2.907,22	2.802,11	3.252,06	3.807,56
F	Konstruksi	372.772,75	377.342,69	453.243,24	568.107,69	669.290,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	1.687.801,58	1.845.780,33	1.998.137,12	2.542.000,42	2.857.828,46
H	Transportasi dan Pergudangan	48.787,77	55.017,88	61.660,48	70.853,87	77.949,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65.268,12	76.263,65	100.546,20	145.337,98	162.840,21
J	Informasi dan Komunikasi	95.898,25	109.781,23	118.350,17	139.621,70	165.399,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	107.864,56	134.191,90	155.968,24	184.115,16	177.622,12
L	Real Estate	144.859,93	164.003,78	176.853,21	194.931,61	216.647,42
M,N	Jasa Perusahaan	84,59	101,68	111,52	128,31	139,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	334.081,30	364.770,03	394.835,49	408.543,27	433.042,55
P	Jasa Pendidikan	106.040,94	115.948,41	121.754,91	134.001,05	161.135,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24.044,63	27.889,90	30.572,78	36.617,06	43.617,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	74.716,05	76.420,26	86.332,75	111.171,29	126.115,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		49.757.232,31	58.953.747,42	65.200.092,05	75.026.218,46	70.318.983,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		27.778.204,03	31.229.564,97	33.893.289,10	39.785.691,86	44.673.073,53

Tabel 18. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.494.179,81	13.222.225,69	13.580.744,00	14.650.262,04	14.714.081,91
B	Pertambangan dan Penggalian	18.169.578,88	18.007.624,95	17.565.397,27	17.623.939,52	17.606.932,77
C	Industri Pengolahan	6.310.185,63	6.968.383,27	7.808.140,18	8.210.356,32	8.450.703,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.952,83	7.568,78	7.821,67	9.551,93	10.154,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.577,30	3.619,42	3.655,68	3.660,38	3.735,20
F	Konstruksi	384.638,66	426.342,83	461.359,41	518.648,05	566.229,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	1.641.941,09	1.766.641,17	1.889.062,03	1.968.011,96	2.021.789,44
H	Transportasi dan Pergudangan	47.587,20	52.408,88	57.439,28	61.523,87	65.863,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61.424,87	67.280,92	73.440,95	79.875,15	83.128,11
J	Informasi dan Komunikasi	94.124,10	102.851,84	113.411,00	124.236,61	134.873,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	101.524,16	114.489,67	125.789,38	141.467,62	133.763,15
L	Real Estate	131.522,21	138.503,84	146.127,30	154.350,73	164.494,44
M,N	Jasa Perusahaan	77,00	82,49	87,80	92,79	96,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	322.816,95	338.076,38	356.676,55	365.327,24	381.411,50
P	Jasa Pendidikan	98.798,13	103.993,29	108.539,96	114.917,81	121.697,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23.546,85	25.565,80	27.358,33	29.400,82	32.300,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	68.328,41	72.572,12	80.013,13	88.583,28	92.289,81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		39.960.804,08	41.418.231,33	42.405.063,91	44.144.206,11	44.583.546,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		25.988.537,18	27.848.491,57	29.419.225,97	31.444.255,02	32.106.015,06

Tabel 19. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.328.805,95	3.619.481,38	3.988.554,30	4.758.333,86	5.240.132,72
B	Pertambangan dan Penggalian	3.297.918,24	4.118.056,36	4.406.301,12	4.550.065,43	3.367.127,86
C	Industri Pengolahan	2.282.085,04	2.454.093,33	2.783.903,34	3.223.620,63	3.609.285,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.133,04	2.942,79	2.922,18	2.863,39	4.157,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	360,64	390,89	400,04	480,41	629,97
F	Konstruksi	294.217,04	319.115,34	445.317,71	616.540,72	655.353,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	560.400,98	719.369,93	754.915,66	1.119.637,18	1.315.668,02
H	Transportasi dan Pergudangan	166.868,16	212.099,70	249.048,22	308.994,25	347.919,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.980,52	19.666,54	25.917,32	39.352,60	43.941,66
J	Informasi dan Komunikasi	28.792,92	41.539,61	55.705,17	71.893,85	81.786,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	27.709,72	36.471,37	38.234,74	43.313,30	45.451,41
L	Real Estate	34.054,00	40.577,59	43.837,45	53.774,19	62.264,66
M,N	Jasa Perusahaan	226,59	274,30	320,76	392,56	453,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	186.139,53	205.458,05	245.809,97	263.846,56	286.946,81
P	Jasa Pendidikan	19.241,75	20.557,48	22.730,67	27.424,35	32.351,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.940,07	5.680,87	6.802,34	8.508,83	10.714,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	23.881,51	24.661,96	30.243,46	37.781,99	39.805,46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		10.275.755,70	11.840.437,48	13.100.964,46	15.126.824,09	15.143.992,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		6.980.908,30	7.725.863,55	8.756.884,95	10.649.589,09	11.850.171,31

Tabel 20. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.415.197,00	3.633.414,15	3.850.191,85	4.103.283,68	4.150.317,25
B	Pertambangan dan Penggalian	2.156.038,81	2.116.683,91	1.945.116,28	1.796.254,98	1.672.463,20
C	Industri Pengolahan	2.291.232,56	2.492.473,56	2.752.799,02	2.952.207,81	3.196.539,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.431,89	3.922,10	4.066,00	3.116,28	3.348,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	506,72	562,03	578,41	581,13	595,77
F	Konstruksi	283.397,23	298.954,19	348.076,48	409.783,25	427.536,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	583.735,86	738.629,86	756.411,49	803.818,99	866.886,84
H	Transportasi dan Pergudangan	171.557,80	209.518,86	228.034,86	252.632,14	266.653,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.822,24	18.563,53	20.220,32	23.027,51	23.971,06
J	Informasi dan Komunikasi	58.451,34	62.349,77	64.629,61	67.641,35	72.489,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	26.795,45	32.712,37	31.448,33	33.032,13	32.684,54
L	Real Estate	34.962,41	39.490,84	42.451,55	46.271,01	50.764,20
M,N	Jasa Perusahaan	212,27	262,68	295,27	332,23	367,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	199.317,99	213.125,67	232.231,39	239.477,41	253.096,21
P	Jasa Pendidikan	18.835,74	19.537,32	19.969,51	20.976,16	21.827,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.917,45	5.337,10	5.913,04	6.506,37	7.419,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	22.512,02	24.271,50	27.326,76	29.935,02	30.595,53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9.287.924,79	9.909.809,44	10.329.760,17	10.788.877,45	11.077.555,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		7.135.301,84	7.796.969,73	8.433.954,55	9.046.000,32	9.455.567,55

Tabel 21. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PEKANBARU ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	832.265,34	923.554,77	1.024.011,56	1.156.508,36	1.342.353,21
B	Pertambangan dan Penggalian	10.033,31	11.249,54	12.461,14	13.756,95	16.235,74
C	Industri Pengolahan	10.083.653,28	11.473.151,40	12.272.526,75	14.013.850,35	16.703.456,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	94.982,68	96.069,57	97.803,91	114.232,30	135.180,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.173,35	11.912,97	11.496,15	11.977,58	13.351,50
F	Konstruksi	13.984.355,39	16.036.782,60	17.893.456,53	22.534.971,85	25.143.478,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	13.741.503,90	16.067.019,28	17.131.976,82	22.157.999,88	24.520.354,90
H	Transportasi dan Pergudangan	1.122.704,44	1.325.879,33	1.495.872,62	1.793.556,62	2.105.082,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	886.971,39	1.105.173,57	1.266.298,51	1.765.161,45	1.822.509,00
J	Informasi dan Komunikasi	1.180.265,96	1.370.444,07	1.402.089,92	1.583.786,61	1.818.250,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.639.248,00	2.020.821,03	2.236.937,27	2.668.747,22	2.971.439,24
L	Real Estate	1.410.678,96	1.620.387,63	1.759.101,25	2.037.801,22	2.404.177,92
M,N	Jasa Perusahaan	7.536,05	9.294,14	10.631,63	13.539,02	15.366,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2.013.639,88	2.348.832,85	2.468.441,48	2.554.745,83	2.751.629,46
P	Jasa Pendidikan	551.181,81	586.288,21	631.161,71	819.218,58	956.881,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	203.296,34	236.664,69	266.329,00	329.291,56	407.609,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	418.650,02	448.490,78	511.863,32	665.872,83	904.612,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		48.192.140,12	55.692.016,42	60.492.459,55	74.235.018,20	84.031.969,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		48.192.140,12	55.692.016,42	60.492.459,55	74.235.018,20	84.031.969,03

Tabel 22. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PEKANBARU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	765.576,42	800.009,41	838.732,38	873.500,13	900.698,87
B	Pertambangan dan Penggalian	9.017,90	9.332,62	9.692,86	10.040,83	10.275,79
C	Industri Pengolahan	9.217.725,37	10.050.826,87	10.856.123,36	11.660.216,32	12.581.984,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	96.139,43	99.833,30	101.754,48	104.591,26	110.061,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.380,53	11.478,40	11.349,56	11.468,52	11.774,03
F	Konstruksi	13.110.019,19	13.396.719,67	13.833.805,06	14.974.548,61	15.957.717,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	12.655.990,54	14.058.300,99	14.932.338,59	15.765.041,14	16.114.687,35
H	Transportasi dan Pergudangan	1.077.204,39	1.206.734,56	1.282.437,08	1.387.597,96	1.481.825,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	819.313,72	926.506,69	950.473,77	1.000.056,81	1.006.034,38
J	Informasi dan Komunikasi	1.175.266,49	1.382.920,90	1.509.032,03	1.570.772,39	1.694.228,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.543.553,93	1.721.849,60	1.804.301,15	2.050.690,23	2.187.502,69
L	Real Estate	1.307.385,16	1.414.929,06	1.493.506,46	1.577.683,01	1.711.993,93
M,N	Jasa Perusahaan	7.113,00	7.942,01	8.663,73	10.424,87	11.129,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.980.810,34	2.122.171,15	2.189.348,86	2.230.117,43	2.271.539,40
P	Jasa Pendidikan	501.590,06	522.695,65	544.852,18	576.025,74	609.550,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188.490,94	207.341,28	227.702,35	249.443,39	275.054,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	379.192,62	412.144,46	459.053,09	518.060,85	621.289,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		44.845.770,01	48.351.736,61	51.053.167,00	54.570.279,50	57.557.347,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		44.845.770,01	48.351.736,61	51.053.167,00	54.570.279,50	57.557.347,62

Tabel 23. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.195.515,02	1.247.513,76	1.290.663,15	1.437.574,71	1.547.478,31
B	Pertambangan dan Penggalian	87.980,96	90.719,37	93.218,95	108.904,95	120.471,72
C	Industri Pengolahan	9.468.325,99	9.345.365,12	10.909.915,76	12.468.900,37	13.160.756,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.604,19	7.674,18	7.555,57	10.894,09	15.716,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.374,30	3.520,36	3.454,51	3.653,86	4.044,55
F	Konstruksi	2.230.760,63	2.337.085,15	2.556.624,71	2.512.176,39	2.819.884,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	3.681.731,10	3.861.649,38	4.014.813,24	4.789.145,67	5.026.523,15
H	Transportasi dan Pergudangan	477.523,61	551.241,25	615.012,00	727.106,64	807.615,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113.141,90	126.321,93	162.081,92	220.381,58	235.071,24
J	Informasi dan Komunikasi	145.290,05	173.009,54	198.535,24	234.989,02	270.710,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	308.613,79	462.454,81	578.397,53	366.129,13	355.025,11
L	Real Estate	87.925,61	92.715,08	100.011,55	113.119,61	127.215,13
M,N	Jasa Perusahaan	808,63	965,13	1.070,51	1.223,74	1.419,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	407.170,47	453.573,61	474.552,02	494.473,40	524.615,72
P	Jasa Pendidikan	84.449,20	89.696,05	96.837,53	122.921,41	142.978,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25.735,63	29.852,50	33.349,65	37.775,23	46.880,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	79.469,74	83.006,22	95.672,32	117.702,05	142.498,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		18.406.420,81	18.956.363,45	21.231.766,16	23.767.071,85	25.348.904,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		11.689.783,39	12.621.528,27	13.523.337,88	15.093.963,52	16.230.646,17

Tabel 24. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011 - 2015 (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.132.320,27	1.131.619,66	1.119.969,76	1.138.071,39	1.139.967,28
B	Pertambangan dan Penggalian	85.549,72	86.416,17	86.479,50	87.258,58	87.421,17
C	Industri Pengolahan	9.771.772,16	10.035.476,89	10.414.550,79	11.088.754,35	11.116.755,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.861,77	10.521,20	11.612,14	12.896,96	13.733,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.313,23	3.341,93	3.363,44	3.428,96	3.523,70
F	Konstruksi	2.041.231,44	2.117.406,69	2.181.412,05	2.011.314,46	2.119.777,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mot	3.543.891,06	3.652.938,24	3.735.616,92	3.884.270,34	3.946.043,56
H	Transportasi dan Pergudangan	453.613,61	503.239,11	537.461,38	591.001,20	602.252,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107.986,83	123.319,23	134.378,76	146.744,72	150.191,31
J	Informasi dan Komunikasi	144.674,61	170.547,14	206.134,11	229.294,86	245.697,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	292.164,14	397.959,44	471.332,89	285.154,19	265.536,84
L	Real Estate	81.753,51	83.055,84	86.988,13	90.248,56	94.773,07
M,N	Jasa Perusahaan	772,36	831,69	883,50	958,60	1.032,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	402.020,00	412.483,99	419.717,32	421.465,77	429.988,77
P	Jasa Pendidikan	74.949,82	78.210,66	82.520,25	89.917,60	94.631,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24.430,20	26.531,16	28.650,41	29.384,74	32.305,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	71.957,57	75.946,65	84.596,52	94.630,46	102.020,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		18.242.262,31	18.909.845,70	19.605.667,85	20.204.795,72	20.445.651,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		11.170.618,14	11.583.434,03	12.096.107,64	12.396.250,85	12.778.572,22

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATITISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No.12, Pekanbaru 28131

Telp. (0761) 23042 - 21336, Fax. (0761) 21336

Homepage://riau.bps.go.id, email:bps1400@bps.go.id